

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BENCANA  
BANJIR DI LINGKUNGAN LEBAK KELURAHAN TUKANGKAYU KECAMATAN  
BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI**

Dea Apsari Pramudana Putri

NPP. 31.0523

*Asdaf Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur  
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: [apsari20@gmail.com](mailto:apsari20@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Sulthon Rohmadin, S.STP., M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *Flooding is an annual disaster that continues to hit Banyuwangi Regency, especially the Lebak Neighborhood area of Tukangkayu Village. Lebak Neighborhood is a residential area that has a very low soil depth of 6mdpl so it is prone to flooding when there is high intensity rain. Various disaster management programs from the government have been implemented. However, annual disasters still continue to hit and submerge the Lebak Neighborhood area. **Purpose:** This research aims to be able to find out, analyze, and describe how the application of Collaborative Governance is established between the government, the business world, and community groups in the Lebak Environment, Tukangkayu Village, Banyuwangi District, Banyuwangi Regency in flood disaster management. **Method:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder dalam menunjang hasil penelitian. Penelitian ini bertumpu pada teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Peneliti mewawancari 22 informan kunci yang di dalamnya terdapat perwakilan dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan BPBD sebagai leading sektornya. **Result:** Collaboration between the government, businesses and community groups has been carried out but not optimized, so it is necessary to maximize their role in the preventive and monitoring stages. The government still tends to be more dominant than businesses and community groups. The collaboration process resulted in two units of permanent water pumping machines, river plengsengan, river normalization programs, and the implementation of a disaster task force consisting of all stakeholders. In the implementation of this collaboration, there are several obstacles, such as the lack of public awareness of the importance of not throwing garbage or waste into the river, the difficulty of accessing heavy equipment in the form of excavators to the river, the constrained operation of water pumping machines, the conversion of plantation crop commodities in the upstream area, and the very low condition of the Lebak region. **Conclusion:** Based on the problems faced, it is necessary to maximize the role of each party involved in each stage of disaster management and innovations related to solving the problems being experienced. The government still plays a superior role while the business world and the community still play an inferior role. **Recommendations** It is necessary to equalize each role between the government, the business world, and the community so that flood disaster management can be maximized.*

*Keyword: Flood, Disaster, Collaborative Governance, Management*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Bencana alam banjir merupakan bencana tahunan yang terus melanda Kabupaten Banyuwangi terkhusus kawasan Lingkungan Lebak Kelurahan Tukangkayu. Lingkungan Lebak merupakan kawasan permukiman yang memiliki kedalaman tanah yang sangat rendah yakni 6mdpl sehingga rawan terendam oleh banjir apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Berbagai program penanggulangan bencana dari pemerintah telah dilaksanakan. Akan tetapi, bencana tahunan masih terus melanda dan merendam kawasan Lingkungan Lebak. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui, menganalisis, serta mendeskripsikan bagaimana penerapan *Collaborative Governance* yang terjalin antara pihak pemerintah, dunia usaha, dan kelompok masyarakat di Lingkungan Lebak, Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dalam penanggulangan bencana banjir. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder dalam menunjang hasil penelitian. Penelitian ini bertumpu pada teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Peneliti mewawancarai 22 informan kunci yang di dalamnya terdapat perwakilan dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan BPBD sebagai *leading* sektornya. **Hasil/Temuan:** Kolaborasi antara pihak pemerintah, dunia usaha, dan kelompok masyarakat sudah terlaksana tetapi belum optimal sehingga perlu dilakukan pemaksimalan peranan pada tahapan preventif dan monitoring. Pihak pemerintah masih cenderung lebih dominan dibandingkan dengan dunia usaha dan kelompok masyarakat. Proses kolaborasi tersebut menghasilkan dua unit mesin pompa air permanen, plengsengan sungai, program normalisasi sungai, dan pelaksanaan apel satgas bencana yang beranggotakan seluruh stakeholder. Dalam pelaksanaan kolaborasi ini terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tidak membuang sampah atau limbah ke sungai, sulitnya akses alat berat berupa ekskavator menuju sungai, terkendalanya pengoperasian mesin pompa air, terjadinya alih fungsi komoditas tanaman perkebunan di daerah hulu, serta kondisi wilayah Lebak yang sangat rendah. **Kesimpulan:** Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka diperlukan adanya upaya pemaksimalan peranan masing-masing pihak terlibat pada setiap tahapan manajemen bencana serta inovasi terkait pemecahan masalah yang sedang dialami. Pemerintah masih memegang peranan superior sedangkan dunia usaha dan masyarakat masih memegang peranan secara inferior. **Rekomendasi:** Perlu dilakukan penyetaraan masing-masing peran antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sehingga penanggulangan bencana banjir dapat maksimal.

Kata Kunci: Banjir, Bencana, *Collaborative Governance*, Penanggulangan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman suku, budaya, keindahan alam serta sumber daya alam, baik flora maupun faunanya. Letak Indonesia yang tepat berada pada garis khatulistiwa membuatnya indah bagaikan batu zamrud. Kondisi tersebut membuat negara ini dijuluki sebagai Negeri Zamrud Khatulistiwa. Dibalik keindahannya, Letaknya yang tepat pada garis khatulistiwa membuat Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, khususnya bencana banjir dan kekeringan dikarenakan Indonesia beriklim tropis. Pada tahun 2021 sebanyak 5.402 kejadian dengan frekuensi bencana yang paling sering terjadi adalah banjir, yakni sebanyak 1.794 kejadian atau setara dengan 33,2% dari total kejadian bencana nasional pada tahun 2021. Tercatat sepanjang tahun 2022 terdapat sebanyak 3.542 peristiwa bencana alam dengan frekuensi bencana yang paling sering terjadi adalah banjir, yakni sebanyak 1.530 kejadian. Jumlah ini setara dengan 43,1% dari total kejadian

bencana nasional tahun 2022. Terdapat sebanyak 3.056 peristiwa bencana alam di Indonesia selama periode 1 Januari 2023 hingga 3 Oktober 2023. Tercatat pada tahun 2023 bencana banjir masih mendominasi, yakni sejumlah 893 kejadian atau setara dengan 29,2% dari total kejadian bencana nasional pada tahun 2023, diikuti dengan cuaca ekstrem sebanyak 861 kejadian (BNPB, 2023). Salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman bencana ialah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai kelas risiko bencana banjir tinggi dengan capaian skor sebesar 16,3 (IRBI, 2022). Banjir perkotaan di Kabupaten Banyuwangi seringkali terjadi sebagai jenis banjir yang umumnya dipicu oleh tingginya curah hujan serta sistem drainase yang kurang efektif. Banjir terburuk terjadi di Lingkungan Lebak Kelurahan Tukangkayu karena hujan deras dan meluapnya Sungai Kalilo. Dampaknya adalah terjadinya genangan air yang berlebihan di permukiman daripada air tersebut mengalir ke sungai sesuai fungsinya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan serangkaian program penanggulangan banjir di Lingkungan Lebak. Pemerintah melalui BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan, dan Dinas PU Bina Marga berkolaborasi untuk melakukan serangkaian program penanggulangan banjir, yakni upaya normalisasi Sungai Kalilo, pembangunan rumah pompa air, reboisasi, pembersihan gorong-gorong, dan pemetaan titik rawan banjir sebagai langkah antisipasi banjir menjelang musim hujan. Pada kenyataannya penanggulangan yang dilakukan tersebut nyatanya masih belum optimal. Ancaman banjir masih tetap signifikan, terutama saat curah hujan tinggi mengguyur wilayah kota. Pada kenyataannya penanggulangan yang dilakukan tersebut nyatanya masih belum optimal. Program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten tersebut nyatanya belum mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Masyarakat masih belum menunjukkan peran yang optimal dalam penanggulangan banjir. Pihak swasta juga menunjukkan kurangnya peran dalam penanggulangan banjir.

Kawasan hulu sungai di Gunung Ijen yang menjadi penyebab banjir di Kecamatan Banyuwangi adalah kawasan Gantasan. Kawasan yang seharusnya menjadi kawasan resapan air tersebut beralih fungsi menjadi kawasan komoditas tanaman pertanian hortikultura. Oleh karena itu, perlu diterapkan upaya kolaborasi sesuai dengan prinsip (Ansell & Gash, 2008) bahwa penanggulangan bencana dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga non pemerintah seperti pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dengan tujuan agar dapat memaksimalkan dan menutupi kekurangan masing-masing komponen.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Program penanggulangan bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana nyatanya masih belum optimal. Ancaman banjir masih tetap signifikan, terutama saat curah hujan tinggi mengguyur wilayah kota. Peran pemerintah masih tergolong paling dominan dibandingkan dengan peran masyarakat dan lembaga non pemerintah seperti dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan, hal ini bertolak belakang dengan teori (Ansell & Gash, 2008) yang mengharuskan adanya keseimbangan antara peran lembaga publik dengan pemangku kepentingan "Non state" dalam merumuskan komitmen bersama demi terciptanya lingkungan yang berfokus pada adanya saling menguntungkan seluruh pihak di dalamnya.

Program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten tersebut nyatanya belum mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Masyarakat masih belum menunjukkan peran yang optimal dalam penanggulangan banjir. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya warga di Lingkungan Lebak yang membuang sampah di sungai dan aliran air. Warga setempat pun masih mendirikan bangunan di bantaran sungai sehingga menyulitkan berbagai program mitigasi bencana. Kurangnya partisipasi masyarakat terkait program penanggulangan banjir ini sejalan dengan permasalahan yang termuat dalam Renstra BPBD Tahun 2021-2026 yang

menyatakan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran dan pengetahuan yang rendah terhadap penanggulangan bencana, khususnya bencana banjir (BPBD, 2021).

Peralihan jenis tanaman perkebunan terjadi di daerah hulu yang awalnya tanaman keras dengan kemampuan menyerap air dan menahan sedimen tanah berubah menjadi tanaman komoditas pertanian hortikultura yang tidak mampu menjaga keseimbangan lingkungan hulu. Akibatnya air hujan tidak terserap sempurna ke dalam tanah dan mengalir ke hilir sungai dengan membawa tanah yang menyebabkan pendangkalan sungai di hilir. Tidak adanya regulasi yang mengatur tentang pelestarian kawasan hulu sungai menyebabkan permasalahan banjir ini terjadi terus menerus. Pemerintah belum memiliki regulasi yang mengatur tentang kawasan hulu sungai supaya sesuai untuk peruntukannya.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks manajemen bencana, *collaborative governance*, serta penanggulangan dalam bidang kebencanaan: Penelitian sebelumnya yang pertama ditulis oleh Khaerul Umam Noer dan Sipin Putra pada tahun 2022 dengan judul *Collaborative Governance in Natural Disaster Mitigation in Bekasi Regency, Indonesia* (Noer & Putra, 2022). Penelitian ini menemukan sejumlah temuan krusial. Pertama, ketidakseimbangan antar stakeholder, di mana masyarakat tidak teredukasi dan terlatih dalam mitigasi bencana. Kedua, dari sisi kepemimpinan fasilitatif, peran dari pemimpin baik pemerintah daerah Kabupaten dan tokoh masyarakat sebagai mediator yang belum luas untuk mendukung terjadinya kolaboratif dalam penanggulangan bencana banjir ini serta masyarakat belum mengetahui perannya dalam kolaboratif yang dilakukan. Ketiga dari sisi kelembagaan, belum adanya nota kesepahaman antar stakeholder yang terlibat yang menjelaskan lebih rinci terkait program kolaborasi ini. Selanjutnya transparansi terhadap program belum ada, karena masyarakat belum diberikan ruang secara luas untuk berpartisipasi. Keempat, dalam proses kolaboratif sebagai dimensi inti dalam *collaborative governance* ini, pada dimensi ini terdapat lima indikator yaitu, dialog tatap muka, rasa percaya antar stakeholders, membangun komitmen bersama, menyatukan pendapat serta adanya hasil sementara dari kolaboratif yang dilakukan. Penelitian yang kedua disusun oleh Ananda Urbanus, Rieneke Lusia, dan Aristotulus dengan judul *Mitigasi Bencana Banjir Struktural dan Non Struktural Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan* (Urbanus et al., 2021). Temuan dari penelitian ini adalah Mitigasi bencana yang menyesuaikan dengan tingkat risiko dari bencana dimana desa dengan risiko bencana banjir tinggi yaitu direkomendasikan membuat rencana tentang pembangunan fisik (struktural) dalam upaya mengurangi bahaya dari banjir, kemudian desa dengan risiko bencana banjir sedang yaitu direkomendasikan untuk penambahan maupun perbaikan mengenai bentuk fisik (struktural) pengendalian banjir yang telah ada maupun belum ada, dan daerah dengan risiko bencana banjir rendah yaitu direkomendasikan untuk perbaikan mengenai bentuk fisik (struktural) pengendalian banjir yang telah ada, namun belum maksimal dalam sistem pelaksanaannya. Penelitian yang ketiga berjudul *Pelaksanaan Collaborative Governance dalam Desa Tangguh Bencana (Studi Kasus Di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul)* ditulis oleh Anto Yulianto dan Dyah Mutiarin pada tahun 2018 (Yulianto & Mutiarin, 2018). Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang terjadi dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana secara umum mengikuti model *Collaborative Governance* yang diperkenalkan oleh Ansell dan Gash. Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kolaborasi dalam Desa Tangguh Bencana di Desa Poncosari mencakup pengalaman masa lalu terkait bencana, bantuan fasilitasi yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, peran yang dimainkan oleh kepemimpinan di Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa, tingkat partisipasi yang aktif dalam forum lembaga desa, serta aktivitas yang terkait dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Bimosuci Poncosari sebagai lembaga pelaksana

operasional di Desa Poncosari. Penelitian yang keempat disusun oleh Alyaa Larasati Hasna dan Awang Darumurti pada tahun 2023 berjudul Collaborative Governance dalam mitigasi bencana banjir rob di Kota Pekalongan (Hasna & Darumurti, 2023). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa bentuk Collaborative Governance yang diimplementasikan tercermin dalam sejumlah program. Program tersebut termasuk kajian dan riset pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana dan MCK Adaptif di wilayah Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara. Program-program tersebut berhasil mengurangi risiko yang terkait dengan banjir rob. Meskipun demikian, keterbatasan sumber daya menyebabkan program mitigasi banjir rob belum merata di seluruh wilayah Kota Pekalongan. Penelitian yang kelima berjudul Kolaborasi Penta Helix dalam Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi ditulis oleh Lina Putri Pasaribu, Nurliana, dan Sri Sulastri (Pasaribu et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berperan mengkoordinasi para unsur atau pemangku kepentingan lainnya supaya berkontribusi dalam pengembangan kolaborasi ini. Khususnya pada situasi pasca bencana gempa bumi dibutuhkan kesigapan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah demi mempercepat penanganan bencana serta meminimalisir kelalaian. Bisnis dapat berperan menopang kebutuhan materil maupun non materil sesuai usaha dan kapasitas yang dimiliki. Akademisi berperan sebagai konseptor untuk membangun konsep, teori, dan model baru untuk membantu penanganan pasca bencana. Media membantu peningkatan kesadaran bencana dalam rangka kesiapsiagaan bencana, saat bencana atau tanggap darurat, dan pasca bencana; yang didukung oleh peningkatan teknologi dan akses informasi melalui berbagai platform. Sedangkan komunitas berperan sebagai akselerator, di mana membantu mempercepat proses pencapaian pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi sesuai dengan arahan dari penanggung jawab atau koordinator penanganan pasca bencana. Sementara itu pekerja sosial memiliki peranan sebagai relawan bencana, perencana program kebencanaan, dan pelaksana program kebencanaan. Penelitian yang keenam berjudul Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur ditulis oleh Novy Setia Yunas pada tahun 2019 (Setya Yunas, 2019). Temuan dari penelitian ini adalah kesenjangan kesejahteraan, tingginya jumlah penduduk miskin, minimnya akses informasi dan buruknya sarana infrastruktur di perdesaan menjadi akar permasalahan kemiskinan. BPS mencatat, pada 2018 sekira 1.035 desa mampu mengoptimalkan potensi desanya dari 8.496 wilayah setingkat desa di Jawa Timur. Problem tersebut diharapkan dapat direduksi melalui lahirnya UU No 6 tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengembangkan potensi yang ada. Desa didorong agar mampu mengembangkan berbagai inovasi dan bersinergi dengan akademisi, sektor swasta, pemerintah, dan media (penta helix). Penelitian yang ketujuh ditulis oleh Ayu Sekar Ningrum dan Kronika dengan judul Strategi Penanganan Banjir Berbasis Mitigasi Bencana Pada Kawasan Rawan Bencana Banjir di Daerah Aliran Sungai Seulalah Kota Langsa (Ningrum & Ginting, 2020). Temuan dari penelitian ini adalah strategi penanganan banjir berbasis mitigasi bencana di kawasan rawan banjir di Kota Langsa terbagi menjadi dua, yaitu: (1). Mitigasi struktural berupa penjelasan mengenai pembuatan bangunan pengendali banjir seperti pembuatan tanggul, pembuatan struktur jaringan drainase, dan pembuatan drop structure; (2) Mitigasi non struktural berupa pelatihan dan simulasi mitigasi bencana, serta pengevaluasian kebijakan pengurangan risiko dampak bencana banjir pada kawasan rawan bencana banjir di Kota Langsa, Aceh, Indonesia. Penelitian yang kedelapan berjudul Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Semarang yang ditulis oleh Aprilia Findayani (Findayani Aprilia, 2018). Temuan penelitian menunjukkan bahwa orang-orang di daerah pesisir memiliki tingkat tinggi pengetahuan tentang banjir (64%). Pengetahuan ini relatif tinggi pada jumlah pengalaman masa lalu mereka; namun mereka kurang dalam kesiapan (43%) karena sebagian besar warga adalah nelayan yang berpenghasilan rendah sehingga mereka bisa tidak harus banyak usaha untuk beradaptasi rumah yang terkena banjir. Di sisi lain, orang-orang di pedalaman, mereka kurang pengetahuan

(18%) karena banjir relatif baru di daerah mereka; tetapi mereka memiliki tingkat yang baik dari kesiapan (24%) karena mereka tingkat pendapatan yang relatif tinggi. Selanjutnya, kedua komunitas di daerah pesisir dan pedalaman memiliki tingkat tinggi tindakan karena pengetahuan dan pengalaman yang tinggi bagi warga pesisir dan kesiapan yang baik bagi warga pedalaman. Penelitian kesembilan berjudul Strategi Penanganan Banjir Di Kampung Babakan Bandung Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng ditulis oleh Derivan Sunarya dan Edi Sutoyo (Sunarya & Sutoyo, 2023). Temuan dari penelitian ini adalah Masyarakat Desa Leuwisadeng masih memiliki kesulitan dalam menghadapi bencana banjir yang sering menerpa Desa Leuwisadeng. Walaupun upaya yang dilakukan masyarakat sudah sering dilakukan, namun masih tidak cukup dalam menghadapi masalah banjir ini. Penelitian yang kesepuluh ditulis oleh Saipullah Hasan dan Avin Wimar Budyastomo dengan judul Pemberdayaan Penanggulangan Banjir Desa Kemiri Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan (Hasan & Budyastomo, 2018). Temuan dari penelitian ini adalah hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa upaya pendampingan tim pendamping KKN dilakukan dengan advokasi, gerakan penghijauan, dan pembersihan lingkungan desa. Melalui berbagai pendampingan tersebut, terlihatlah bagaimana masyarakat terlibat aktif dalam melakukan proses pencegahan dan penanganan bencana banjir.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan mencakup ketiga kondisi manajemen kebencanaan yakni pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana dengan menggunakan seluruh indikator kolaborasi dari teori Ansell dan Gash. Peneliti melakukan penelitian terhadap *Collaborative Process* yang terjadi di Lingkungan Lebak dengan memperhatikan ketiga indikator pendukung teori proses kolaborasi oleh Ansell dan Gash yakni *Starting Condition*, *Facilitative Leadership* dan *Institutional Design*. Dari penelitian tersebut peneliti menemukan fakta bahwa pelaksanaan proses kolaborasi yang terjadi dalam rangka penanggulangan bencana banjir masih belum optimal terkhususnya dalam tahap pra bencana. Dari penelitian tersebut peneliti menemukan fakta bahwa pelaksanaan kolaborasi dalam hal penanggulangan bencana di Lingkungan Lebak sudah berjalan namun belum optimal. Ditemukan peranan masyarakat dan dunia usaha masih belum mendukung penuh program penanggulangan bencana yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, serta mendeskripsikan bagaimana penerapan Collaborative Governance di Lingkungan Lebak Kelurahan Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dalam penanggulangan bencana banjir.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Sehingga data yang terkumpul berupa kata-kata dan gambar tanpa penekanan pada aspek numerik. Proses penelitian kualitatif memahami makna, menggali keunikan, mengonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, dan pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi, yakni teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan dengan data dan sumber yang telah ada (Sugiyono, 2021). Menurut Simangunsong (2017) dalam bukunya Metodologi Penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergent, dimana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami. Penelitian kuantitatif, juga dikenal sebagai penelitian partisipatif, memiliki desain penelitian yang dapat

disesuaikan dengan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Instrument penelitian digunakan oleh peneliti untuk mempermudah proses pengumpulan data. Dengan metode penelitian ini peneliti dapat mencari tahu bagaimana penerapan *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana di Lingkungan Lebak secara mendalam serta merekomendasikan upaya untuk mengoptimalkan proses kolaborasi yang diterapkan. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan 22 informan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan mendalam. Adapun jenis sumber data yang digunakan peneliti ada 2 yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari lokasi dan subjek penelitian yang menjadi fokus. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya dan berperan sebagai tambahan informasi yang mendukung data primer (Sugiyono, 2021). Adapun untuk menganalisis data sehingga mendapatkan menghasilkan suatu temuan maka peneliti menggunakan teori kolaborasi dari (Ansell & Gash, 2008) yang terdiri dari 4 dimensi yaitu *Starting Condition*, *Facilitative Leadership*, *Institutional Design*, dan *Collaborative Process*.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Penerapan *Collaborative Governance* di Lingkungan Lebak Kelurahan Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dalam Rangka Penanggulangan Bencana Banjir

Peneliti menganalisis penerapan pelaksanaan Collaborative Governance yang dilakukan di Lingkungan Lebak Kelurahan Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dalam penanggulangan bencana banjir menggunakan teori kolaborasi dari (Ansell & Gash, 2008) yang terdiri dari 4 dimensi yaitu *Starting Condition*, *Facilitative Leadership*, *Institutional Design*, dan *Collaborative Process*.

##### 3.1.1. *Starting Condition*

*Starting condition* yaitu kondisi awal kolaborasi dilaksanakan yang mempengaruhi proses kolaborasi yang akan terjadi. Kondisi ini dapat menjadi pendorong atau pun penghambat kerja sama antara pemangku kepentingan. Kondisi awal yang menyebabkan banjir di Lingkungan Lebak beraneka ragam mulai dari sumber daya, konflik, dan insentif. BPBD Banyuwangi memiliki keterbatasan sarana dan prasarana dalam menanggulangi bencana.

**Tabel 1**

Capaian Target Jumlah Personil dan Sarana dan Prasarana

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SASRAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	- Jumlah peralatan penanggulangan bencana - Jumlah petugas operasional PUSDALOPS	unit  orang x bulan	18  264	13  282	89,52

Sumber: (BPBD, 2022)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah peralatan penanggulangan bencana yang dimiliki oleh BPBD masih belum mencapai targetnya. Target minimal yang telah ditentukan jumlah sarana dan prasarana yang disediakan seharusnya berjumlah 18 unit. Namun, masih

terrealisasi 13 unit. Sedangkan untuk jumlah petugas Pusdalops sendiri telah melebihi target hingga mencapai angka 282. Selain itu, beberapa konflik pun memicu dilaksanakannya kolaborasi. Lingkungan Lebak juga mengalami beberapa konflik di antaranya letak datarannya yang sangat rendah yakni 6mdpl dan mayoritas rumah hunian di permukiman tersebut masih belum bersertifikasi. Masyarakat di Lingkungan Lebak pun masih belum dapat menanggalkan budaya buang sampah di sungai. Hal ini diperparah dengan kawasan perkebunan di Gantasan yang mengalami peralihan komoditas tanam yang awalnya ditanami tanaman keras seperti tebu, kopi, dan cengkeh menjadi komoditas tanaman pertanian palawija. Dorongan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat hanya dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat pada forum penanggulangan bencana Kaltana. Apabila untuk insentif yang jenisnya berupa suntikan dana dengan pemberian reward belum ada.

**Tabel 2**

Realisasi Pencapaian SPM BPBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian SPM
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.708.114 org
		1.708.114 org = 100%
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	208.823 org
		208.823 org = 100 %
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	683.246 org
		683.246 org = 100 %
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.517 org
		3.517 org = 100 %
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	67 pelayanan
		67 pelayanan = 100 %

Sumber: (Banyuwangi, 2023)

Berdasarkan data dari standar pelayanan minimal tersebut target yang harus dicapai sudah 100% dengan kekurangan sumber daya manusia dan jumlah sarana dan prasarana yang ada. Akan tetapi, BPBD ingin meningkatkan dan mengoptimalkan kembali keterbatasan jumlah sumber daya tersebut untuk dapat mencapai hasil yang maksimal khususnya menanggulangi banjir di Lingkungan Lebak.

### 3.1.2. *Fasilitative Leadership*

Unsur kepemimpinan dalam kerjasama tidak terbatas pada pemimpin pemerintahan, lembaga, atau organisasi tertentu. Siapa pun dapat menjadi pemimpin yang memfasilitasi asalkan mampu menggerakkan, memfasilitasi, dan mendorong mencapai tujuan kolaborasi. Setiap individu memiliki potensi sebagai pendorong, fasilitator, penghubung, dan pemimpin fasilitatif dalam mengelola para aktor atau pemangku kepentingan dalam kolaborasi. Dalam konteks kepemimpinan fasilitatif, fasilitasi dilakukan tanpa mengganggu hak para pemangku kepentingan, dengan peran fasilitator yang bertujuan untuk memastikan integritas proses pembentukan konsensus itu sendiri. Kepemimpinan menjadi krusial dalam menetapkan dan mempertahankan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, serta memfasilitasi dialog untuk mencapai kepentingan bersama.

Kolaborasi merupakan kunci utama dalam penanggulangan banjir di lingkungan Lebak Kelurahan Tukangkayu Banyuwangi. Kepemimpinan fasilitatif dapat memainkan peran penting dalam membangun kolaborasi antar berbagai pihak. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan fasilitatif, diharapkan kolaborasi penanggulangan banjir di lingkungan Lebak Kelurahan Tukangkayu Banyuwangi dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan

yang diharapkan. Pimpinan yang berperan aktif dalam penanggulangan banjir di Lingkungan Lebak telah memahami konteks terkait kebencanaan, pasalnya beberapa pihak yang bergelar pemimpin pada setiap instansi telah melakukan tugasnya dalam merealisasikan upaya preventif di Lingkungan Lebak. Pimpinan menjalin hubungan yang baik satu sama lain. Kepala pelaksana BPBD menjalin hubungan yang baik antar sesama pimpinan perangkat daerah yang memiliki tupoksi dalam penanggulangan bencana di Lingkungan Lebak. Pimpinan juga melibatkan pimpinan di lingkup bawahnya seperti camat, lurah, dan RT/RW. Pimpinan telah dapat dengan baik mengatur strategi, menciptakan dan mengadakan suatu barang yang sangat berharga seperti pompa air, dan upaya meyakinkan masyarakat terkait program-program yang digalakkan. Para pemimpin memiliki kemampuan menonjol dalam mendorong kolaborasi dan kerjasama di antara anggota tim BPBD dan pihak-pihak terkait lainnya dalam menangani situasi banjir. Dengan demikian, mereka menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi, pemecahan masalah, dan pembenahan kekurangan secara kolektif sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam penanggulangan banjir.

Sekretaris Daerah dapat disebut sebagai pemimpin yang fasilitatif, mengingat posisinya dalam penanggulangan banjir sebagai Sekretaris Daerah, EX Officio Kepala BPBD yaitu sebagai instansi dan lembaga yang menangani permasalahan banjir. Proses kolaborasi dapat dibangun dengan efektif melalui komunikasi dan penghubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemimpin fasilitatif sangat diperlukan kehadirannya karena memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menjamin kesuksesan suatu program. Semakin berkualitas suatu pemimpin maka dapat mengatur bawahannya dengan baik. Kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir di Lingkungan Lebak tidak hanya melibatkan unsur pimpinan dari BPBD saja melainkan juga Kepala Dinas PU Pengairan, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Camat, Lurah, dan unsur pimpinan dari TNI/Polri di tingkat kabupaten. Dari beberapa unsur pimpinan di atas telah melakukan upaya fasilitatif demi terwujudnya program mereka.

Pimpinan yang berperan aktif dalam penanggulangan banjir di Lingkungan Lebak telah memahami konteks terkait kebencanaan, pasalnya beberapa pihak yang bergelar pemimpin pada setiap instansi telah melakukan tugasnya dalam merealisasikan upaya preventif di Lingkungan Lebak salah satunya langkah normalisasi Sungai Kalilo demi mencegah adanya banjir yang dapat merugikan masyarakat. Para pimpinan dari beberapa dinas yang telah dimintai keterangan oleh peneliti telah berperan aktif untuk meningkatkan perluasan kolaborasi aktif. Dari pihak BPBD sendiri telah memiliki FPRB, Pusdalops, Tim TRC, dan beberapa program tanggap bencana lain yang di dalamnya terdiri bukan hanya dari pihak pemerintahan tetapi juga non pemerintah sesuai prinsip kolaborasi dari Ansell dan Gash. Peneliti menilai bahwa pemahaman ketua RW tersebut cukup baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Lebak untuk dapat melaksanakan hal-hal yang telah dirumuskan oleh pihak pemerintah. Ketua RW yang bernama Bapak Firman turut mendampingi peneliti dalam melakukan observasi di lokasi banjir. Peneliti pun dijelaskan di mana saja letak pembangunan pompa permanen dan plengsengan. Pemahaman teknis dalam konteks kolaboratif adalah pemahaman tentang konsep manajemen bencana, termasuk perencanaan mitigasi, respons darurat, pemulihan, dan pembangunan ketahanan bencana. Pemimpin dituntut untuk dapat paham secara mendalam tentang konsep, prinsip, teori, dan praktik yang terkait dengan bidang tersebut.

Daerah sempadan sungai sekitar 3 meter dari sungai dan tanah tersebut merupakan milik Dinas PU Pengairan. Akan tetapi, pada faktanya ketentuan tersebut masih belum maksimal dilaksanakan oleh warga Lebak. Padahal jarak 3 meter tersebut adalah jarak aman rumah warga dari sungai agar tidak terdampak banjir. Maka dari itu, kami membangun plengsengan yang juga dikenal sebagai dinding penahan tanah dan memiliki peran vital dalam mengurangi risiko banjir dan melindungi daerah sekitar sungai. Plengsengan berfungsi sebagai pengendali banjir

dengan melambatkan aliran air hujan yang memasuki sungai, serta membantu mencegah perluasan sungai yang dapat membahayakan pemukiman di sekitarnya. Selain itu, pohon juga berperan penting dalam mencegah banjir dengan memperlambat aliran air hujan ke sungai dan meningkatkan penyerapan air oleh tanah. Oleh karena itu, pendekatan terpadu dalam pengelolaan sungai, termasuk penggunaan plengsengan dan penanaman pohon, sangat penting untuk mengurangi risiko banjir dan menjaga kelestarian ekosistem sungai. Para pimpinan telah melakukan berbagai upaya teknis untuk menanggulangi banjir salah satunya dengan melakukan upaya normalisasi sungai. Proses pemulihan Sungai Kalilo dilakukan secara bertahap sejak November 2022 di titik-titik yang dianggap kritis. Sedimen di sungai telah berhasil diangkat dengan cukup banyak, dan saluran-saluran yang tersumbat kini telah kembali berfungsi normal. Berikut adalah data pelaksanaan normalisasi Sungai Kalilo yang dilaksanakan berangsur-angsur sejak tanggal 20 November 2022:

**Tabel 3**  
Tanggal Dilaksanakannya Program Normalisasi Sungai

NO	Pelaksanaan Normalisasi Sungai Kalilo
1	2
1.	20 November 2022
2	1 Desember 2022
3	10 Desember 2022
4	20 Februari 2023
5	31 Maret 2023
6	1 April 2023
7	31 Oktoberl 2023
8	3 November 2023

*Sumber: Diolah Peneliti, 2024*

Pimpinan menjalin hubungan yang baik satu sama lain. Baik itu pimpinan tingkat perangkat daerah hingga lingkup kecil di permukiman setempat. Kepala pelaksana BPBD menjalin hubungan yang baik antar sesama pimpinan perangkat daerah yang memiliki tupoksi dalam penanggulangan bencana di Lingkungan Lebak. Pimpinan juga melibatkan pimpinan di lingkup bawahnya seperti camat, lurah, hingga RT/RW. BPBD menjalin hubungan baik hingga ke tingkat yang paling bawah dengan tujuan solusi yang ditawarkan BPBD dapat dirumuskan bersama dan mencapai hasil maksimal sebab masyarakat diikutsertakan dalam perumusan solusi tersebut. Pimpinan antar perangkat daerah yang terkait juga melibatkan peran TNI/Polri di dalamnya. Pada tingkat kelurahan dikerucutkan menjadi peran Babinsa dan Babinkamtibmas. Strategi para pemimpin untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam menanggulangi banjir adalah dengan memberikan aksi nyata terkait program yang sudah direncanakan bersama. Pimpinan berhasil merealisasikan program-program yang telah dibuat hingga kunjungan yang dilakukan Bupati Banyuwangi untuk mengecek kesiapan prasarananya. Dua unit pompa air permanen telah berhasil dibuat di ujung barat dan timur. Klep air pun juga sudah terpasang. Beberapa masyarakat pun juga telah membangun rumah mereka meskipun masih banyak pula warga yang belum mampu meninggikan pondasinya agar lebih tinggi sehingga air banjir tidak sampai menenggelamkan separuh rumah mereka.

### 3.1.3. Institutional Design

Partisipasi dari berbagai pihak dalam pelaksanaan kolaborasi sudah terlaksana dengan baik tetapi belum optimal. Pasalnya, pada saat terjadi bencana di Lingkungan Lebak seluruh *stakeholder* telah aktif dan mau berkontribusi satu sama lain. Partisipasi dari berbagai pihak sudah baik hal ini terlihat dari keterlibatan berbagai pihak pada setiap proses penanggulangan bencana yakni tahapan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana dengan merujuk kepada BPBD sebagai *leading sector*. Kolaborasi terjalin bersama Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU Pengairan, Dinas PU Cipta Karya dan Permukiman, PUDAM, TNI/Polri, dan lainnya. Dalam hal pemenuhan standar pelayanan dasar BPBD dibantu oleh organisasi masyarakat seperti dompet dhuafa, organisasi Nahdatul Ulama, dan suntikan bantuan dari Bank Jatim berupa bantuan sembako. Peran serta pemerintah dominan pada tahapan pra bencana dikarenakan keterlibatan beberapa dinas kabupaten untuk melakukan upaya-upaya preventif banjir seperti normalisasi sungai oleh Dinas PU Pengairan, susur sungai oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan pembuatan sempadan sungai oleh Dinas PU Cipta Karya dan Permukiman.

BPBD telah memiliki program kolaborasi yakni FPRB yang baru dibentuk pada tahun 2022 dan program Kelurahan Tangguh Bencana yang beranggotakan berbagai macam *stakeholder* terkait pada tahun 2023. BPBD melalui Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/1030/Kep/429.011/2022 membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi Periode 2022 – 2025. Forum tersebut dijuluki FPRB yang mana menjadi wadah berkumpulnya berbagai *stakeholder* untuk memudahkan kolaborasi antar pihak. Tugas pokok dan fungsi FPRB meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan tanggung jawab dan fungsi Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi. Tugas-tugas pengurus Forum sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Statuta, yang merupakan bagian integral dari Keputusan ini. Berikut adalah susunan pengurus dan personalia forum pengurangan risiko bencana daerah kabupaten banyuwangi periode 2022 – 2025. Forum yang dibentuk oleh BPBD sendiri cukup banyak selain FPRB dan Klatana yakni Destana, Kaltana, Tagana, dan TRC. Kemudian dari BPBD sendiri memiliki unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana. Pembentukan Pusdalops PB di BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota berada di bawah Bidang Kedaruratan dan Logistik dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Masing-masing pihak terkait bekerja sesuai tupoksinya untuk turut menyumbang bantuan pada setiap tahapan bencana tetapi belum tersedia suatu perjanjian atau MoU yang melandasi. Kedepannya perlu ditetapkan MoU atau suatu nota kesepahaman agar terdapat regulasi legal yang mengatur tentang peranan masing-masing dinas terkait untuk menangani bencana banjir. Di sisi lain, pihak BPBD masih baru akan merancang Rencana Kontijensi yang telah kedaluwarsa tahun 2013 silam pada tahun ini. Penyebab rencana pembaharuan belum diresmikan ialah rencana kontijensi tersebut baru akan disusun di tahun 2024 ini. Belum rampungnya dokumen tersebut selaras dengan data LKJIP BPBD Banyuwangi tahun 2022 yang menyatakan dalam bahwa program penanggulangan bencana tahap pra bencana yakni penyelesaian dokumen kebencanaan BPBD hingga legal masih belum bisa mencapai target 100%. Program tersebut baru terealisasi hingga 85%. hal ini bertolak belakang dengan program presentase penanganan tanggap darurat dan pasca bencana yang telah mencapai target berturut-turut 100% dan 30%. Berikut data tingkat efisiensi BPBD tersebut:

**Tabel 4**

Tingkat Efisiensi Kegiatan BPBD Tahun 2022

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
Program	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	85,00	Belum Efisien
	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	100,00	Efisien
Bencana	Persentase penanganan pasca bencana	30	30,00	Efisien

Sumber: (BPBD, 2022)

Rencana kontijensi (RENKON) dapat terbentuk apabila Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) sudah dibentuk. Fungsi dari rencana kontijensi sendiri adalah sebagai landasan yang digunakan apabila terdapat indikasi ancaman dan untuk landasan pembuatan Rencana Operasional (RENOPS). Berikut adalah fungsi dari ketiga dokumen tersebut:

**Tabel 5**

Perbedaan Dokumen RPKB, RENKON, DAN RENOPS

ASPEK	RPKB	RENKON	RENOPS
1	2	3	4
<b>Kapan</b>	Keadaan Normal	Ada Indikasi Ancaman	Pada Saat Darurat
<b>Cakupan</b>	Semua Ancaman Umum	Satu Ancaman Tertentu	Ancaman yang Telah Menjadi Bencana
<b>Pelibatan</b>	Semua Pihak yang Dapat Terlibat	Pihak yang Diperkirakan Akan Terlibat	Pihak yang Diperlukan Untuk Terlibat
<b>Durasi</b>	Jangka Panjang	Jangka Waktu Tertentu	Sesuai Keadaan Atau Perintah
<b>Sifat Rencana</b>	Perkiraan	Terukur	Persis/Terinci
<b>Muatan</b>	Kerangka Normatif	Kerangka Kerja	Perintah Gerak
<b>Tataran</b>	Pemerintah Umum	Pihak Pelaksana Tanggap Darurat	Komandan Operasi

Sumber: (RPKB BPBD Kab. Banyuwangi, 2023)

Peneliti juga mendapati bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung penanggulangan banjir dari sisi ekologi memang belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur tentang tanaman perkebunan yang berada di daerah hulu. Hanya saja terdapat Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 88/108/Kep/429.011/2019 Tentang Penetapan Kelas Kebun Berdasarkan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2019 bahwa PT Lidjen menanam tanaman yaitu tebu, kopi, dan cengkeh.

### 3.1.4. Collaborative Process

Penanganan kebencanaan banjir di Lebak pada tahap pra bencana telah dilakukan melalui sistem kolaborasi yang dilatarbelakangi kekurangan BPBD yang tidak dapat mengcover bencana sendiri. Kegiatan rapat rutin dilakukan oleh BPBD setiap hari Senin untuk melakukan evaluasi kinerja penanggulangan bencana dengan pihak internal BPBD saja. Akan tetapi, untuk pelaksanaan rapat yang sifatnya kolaboratif dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Dinas

Lingkungan Hidup didukung oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan program-program kebersihan lingkungan demi meminimalisir sampah serta mewujudkan Banyuwangi yang bersih dan mencegah terjadinya bencana terkhususnya banjir. Program tersebut bekerja sama dengan Negara Norwegia untuk membantu dorongan terkait pembiayaan. Dinas PU Pengairan juga telah memberikan dua pompa dengan kapasitas mesin besar untuk mengantisipasi genangan air sungai yang tinggi. Diadakannya pompa tersebut sebagai antisipasi untuk warga Lebak mengingat penanggulangan saat tanggap darurat dapat dilakukan menggunakan pompa permanen tersebut yang dapat dioperasikan oleh warga sendiri melalui pelatihan yang diberikan oleh Dinas PU Pengairan. Dua pompa besar dilengkapi dua klep air sudah tertanam di ujung barat dan timur sungai.

Proses penanggulangan pada tahap pra bencana masih perlu ditingkatkan lagi fungsi pengawasan atau monitoring pada tiap-tiap program yang telah digalakkan. Pihak pemerintah masih mendominasi peranan pada tahapan ini, sedangkan dunia usaha dan masyarakat masih belum mampu menyepadankan kontribusinya khususnya pada tahapan pra bencana. Hal ini tertera pada data dari LKJIP BPBD bahwa proses pra bencana masih belum mencapai target sasaran sedangkan tahap tanggap darurat dan pasca bencana sudah. Pihak BPBD pun masih belum memiliki MoU atau perjanjian yang mengikat antar pihak terkait penanggulangan bencana sehingga sejauh ini pelaksanannya hanya bertumpu pada kepercayaan masing-masing pihak untuk melaksanakan penanggulangan sesuai tupoksinya. Tidak hanya itu, BPBD juga belum selesai menyusun Rencana Kontijensi khusus bencana banjir yang mana keberadaannya cukup penting dan juga sebagai landasan pembuatan Rencana Operasional banjir. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya program-program yang dijalankan sehingga risiko banjir tahunan masih tetap ada.

Hasil sementara yang didapat dari tahap pra bencana adalah pihak perkebunan yang sudah mulai aktif kembali menanam komoditas tanaman keras harus didukung penuh oleh pemerintah sehingga penanamannya dapat merata sehingga daerah hulu menjadi hijau kembali dengan tanaman keras yang dapat menyerap air secara signifikan. Alat-alat pendukung penanggulangan banjir hasil kolaborasi dengan PU Pengairan dan PU Cipta Karya telah tersedia seperti dua buah mesin pompa permanen yang telah didirikan pada rumah pompa di ujung barat dan timur sungai serta telah berdiringnya sempadan diseratai plengsengan sungai untuk melindungi permukiman dari banjir.

Proses penanggulangan banjir pada tahap tanggap darurat bencana telah dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha. Pihak yang terlibat telah mengerahkan kemampuannya untuk mengevakuasi warga saat terjadi banjir. BPBD, Dinas PU Pengairan, dan Dinas PU Cipta Karya sudah secara tanggap melakukan evakuasi dan secara responsif menindaklanjuti aduan warga terkait kendala penggunaan alat pompa air saat banjir melanda. Pihak dari TNI dan Polri juga telah responsif menjadi pihak yang paling pertama hadir sebagai pelindung masyarakat Lebak. Warga Lebak juga sudah cepat tanggap mengoperasikan alat penyedot air permanen pada sisi barat dan timur sungai dan kemudian membuat laporan kepada BPBD terkait kendala yang terjadi agar cepat ditangani. Relawan dan sektor bisnis turut membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih, sandang, pangan, dan papan sementara. Akan tetapi, pada kejadian banjir di bulan Februari 2023 peneliti menemukan fakta bahwa pompa air pemberian Dinas PU Pengairan ternyata masih belum berfungsi maksimal. Alat tersebut sempat mengalami *trouble* sehingga air genangan di permukiman warga tidak dapat disedot ke sungai. Posisi pompa yang *trouble* terdapat pada ujung timur yang mana merupakan wilayah R1 dan RT 2 di Lingkungan Lebak yang merupakan kawasan dengan titik terendah dan paling rawan terdampak banjir. Beruntung Klep air yang disediakan oleh PU Pengairan berfungsi sehingga klep akan ditutup secara otomatis pada saat air Sungai Kalilo naik sehingga air dari dalam sungai tidak memasuki permukiman warga.

Pada tahap pasca bencana keterlibatan ketiga pihak baik dari pemerintah, badan usaha, dan masyarakat sudah relatif sama. BPBD berfokus pada giat rehabilitasi dan rekonstruksi yang dibantu oleh relawan serta TNI dan Polri. Pasca bencana seluruh pihak bergotong royong untuk membersihkan sisa-sisa lumpur yang ada. BPBD pun melalui dana BTT membantu merekonstruksi bangunan rumah warga yang rusak. Pihak lainnya pun turut memberikan bantuan yang beraneka ragam mulai dari bantuan makanan siap saji dari BPBD, bantuan sembako dan alat tulis sekolah dari Bank Jatim dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa, penyediaan air bersih oleh PUDAM Banyuwangi, serta pelayanan kesehatan yang didapatkan di tempat pengungsian oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Berikut adalah tabel kejadian banjir beserta kerusakan yang ditimbulkan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 di Lingkungan Lebak Kelurahan Tukangkayu Banyuwangi:

**Tabel 6**  
Data Kejadian Banjir 4 Tahun Terakhir

No	Tanggal/Bulan/Tahun	Lokasi Kejadian			Data Kerusakan
		Kelurahan	R T	R W	
<b>Tahun 2021</b>					
1	21/01/2020	Tukangkayu Krajan Utara (Ling. Lebak)	1	1	14 Rumah Terendam Banjir Debet Air Setinggi 80 cm
			2		18 Rumah Terendam Banjir Debet Air Setinggi 80 cm
			3		6 Rumah Terendam Banjir Debet Air Setinggi 50 cm
			4		6 Rumah Terendam Banjir Debet Air Setinggi 35 cm
2	07/12/2021	Tukangkayu Krajan Utara (Ling. Lebak)	1	1	12 Rumah Terendam Banjir Debet Air Setinggi 90 cm
			2		18 Rumah Terendam Banjir Debet Air Setinggi 70 cm
			3		20 Rumah Terendam Banjir Debet Air Setinggi 50 cm
			4		8 Rumah Terendam Banjir Debet Air Setinggi 40 cm
<b>Tahun 2022</b>					
3	28/11/2022	Tukangkayu Krajan Utara (Ling. Lebak)	1	1	14 Rumah Terendam Banjir Debet Air Setinggi 1,2 m
			2		18 Rumah Terendam Banjir Debet Air Setinggi 80 cm

No	Tanggal/Bulan/Tahun	Lokasi Kejadian			Data Kerusakan
		Kelurahan	R	R	
			T	W	
			3		6 Rumah Terendam Banjir Debet Air Setinggi 50c m
			4		6 Rumah Terendam Banjir Debet Air Setinggi 60 cm
<b>Tahun 2023</b>					
4	10/02/2023	Tukangkayu Krajan Utara (Ling. Lebak)	1	1	14 Rumah Terendam Banjir Debet Air Setinggi 1,5 m
			2		24 Rumah Terendam Banjir Debet Air Setinggi 1,3 m
			3		8 Rumah Terendam Banjir Debet Air Setinggi 1 m
			4		5 Rumah Terendam Banjir Debet Air Setinggi 90 cm, 1 rumah hanyut
<b>Tahun 2024</b>					
5	04/02/2024	Tukangkayu Krajan Utara (Ling. Lebak)	1	1	10 Rumah Terendam Banjir Debet Air Setinggi 60 cm dan Sempadan Sungai Ambrol

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2024)

### 3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penerapan *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana di Lingkungan Lebak Kelurahan Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dengan memperhatikan aspek yang mempengaruhi proses terjadinya kolaborasi yakni *starting condition* (Kondisi Awal), *Institutional Design* (Desain Kelembagaan), dan *Leadership Fasilitatif* (Kepemimpinan Fasilitatif) sesuai indikator dari teori kolaborasi Ansell dan Gash (2008). Penelitian ini berfokus pada tripel helix yakni kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Hasil penelitian ini menunjukkan peranan ketiga komponen tersebut masih belum optimal dan seimbang, pemerintah masih menjadi pemegang pran superior dalam penanggulangan bencana sedangkan masyarakat dan dunia usaha masih sebatas peran inferior sehingga perlu dilakukan pemaksimalan dan pengoptimalan peran masing-masing *stakeholder* terkait. Hal ini serupa dengan penelitian yang ditulis oleh Anto Yulianto dan Dyah Mutiarin pada tahun 2018 yang mana menghasilkan temuan bahwa proses kolaborasi yang terjadi dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana secara umum mengikuti model *Collaborative Governance* yang diperkenalkan oleh Ansell dan Gash. Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kolaborasi dalam Desa Tangguh Bencana di Desa Poncosari mencakup pengalaman masa lalu terkait bencana, bantuan fasilitasi yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, peran yang dimainkan oleh kepemimpinan di Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa, tingkat partisipasi yang aktif dalam

forum lembaga desa, serta aktivitas yang terkait dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Bimosuci Poncosari sebagai lembaga pelaksana operasional di Desa Poncosari yang mana masih perlu dilakukan evaluasi berkala setiap tahun untuk melihat perkembangan desa tangguh bencana yang telah terbentuk sehingga status tersebut masih dipertahankan. Selain itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lina Putri Pasaribu dkk pada tahun 2023 dan Novy Setia Yunas pada tahun 2019 yang memiliki cakupan *stakeholder* yang lebih luas daripada yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu tersebut melakukan kolaborasi dengan konsep penta helix yang mengikutsertakan akademisi, sektor swasta, pemerintah, masyarakat atau komunitas, dan media yang ada.

### 3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan fakta bahwa Lingkungan Lebak merupakan kawasan permukiman yang sangat rendah dengan kedalaman 6mdpl yang mana normalnya kedalaman dataran rendah agar tidak terkena banjir adalah 18 mdpl. Hal ini mengakibatkan Lingkungan memiliki kedalaman yang setara dengan kedalaman Sungai Kalilo yang tepat berada disampingnya. Hal ini mengakibatkan daerah Lebak menjadi daerah rawan banjir dan drainase yang dibuat menjadi rawan meluapkan air dari dalam tanah.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang penerapan Collaborative Governance dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Lingkungan Lebak Kelurahan Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dapat ditarik kesimpulan bahwa *Collaborative governance* dalam penanggulangan bencana banjir di Lingkungan Lebak Kelurahan Tukangkayu sudah berjalan tetapi belum optimal. Agar dapat optimal maka diperlukan perbaikan pada sistem monitoring sehingga bencana banjir tahunan dapat dicegah dengan maksimal. Seluruh pihak baik dari pemerintah, badan usaha, dan masyarakat telah terlibat dalam upaya penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. BPBD Kabupaten Banyuwangi telah berkolaborasi dengan beberapa dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU Pengairan, Dinas PU Cipta Karya dan Permukiman, TNI, Polri, pihak kelurahan, dan pihak kecamatan serta melibatkan peran serta masyarakat dan badan usaha untuk mewujudkan upaya penanggulangan banjir yang maksimal. Akan tetapi, ketiga komponen tersebut masih belum memiliki kontribusi yang sepadan. Pemerintah memiliki peranan yang lebih dominan atau cenderung superior dibandingkan dengan peranan dari masyarakat dan badan usaha yang cenderung inferior.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki dua keterbatasan utama: waktu dan jarak. Penelitian berlangsung selama dua minggu dan memiliki sedikit waktu untuk informan dan lokasi pengambilan data yang terbatas. Beberapa orang enggan melakukan wawancara secara menyeluruh, dan penelitian dilakukan hanya di satu kelurahan sehingga dapat menghasilkan hasil yang diinginkan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*Future work*).** Peneliti menyadari masih kurangnya temuan penelitian. Oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana dengan mengambil data pada desa/kelurahan yang lebih banyak misalnya berdasarkan kategori kelas kabupaten sehingga dapat menghasilkan temuan lainnya.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuwangi dan jajarannya, Lurah Tukangkayu serta seluruh pihak yang telah mendukung hingga penelitian dapat terselesaikan dengan baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Banyuwangi, P. (2023). *Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023-2027*.
- BNPB. (2023). *Infografis Kejadian Bencana Tahun 2023*.  
<https://bnpb.go.id/infografis/infografis-bencana-tahun-2023>
- BPBD. (2021). Renstra BPBD 2021-2026 Kabupaten Banyuwangi. *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*, 1–52.
- BPBD. (2022). *LKJIP BPBD Kabupaten Banyuwangi*.
- Findayani Aprilia. (2018). Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir. *Jurnal Media Infromasi Pengembangan Ilmu Dan Profesi Kegeografian*, 12(1), 102–114.  
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JG/article/view/8019>
- Hasan, S., & Budyastomo, A. W. (2018). Pemberdayaan Penanggulangan Banjir Desa Kemiri Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Babotoh*, 6(2), 86–99. <http://dx.doi.org/10.26887/bt.v6i2.1669>
- Hasna, A. L., & Darumurti, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob Di Kota Pekalongan. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 7(1), 25–37. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.24210>
- IRBI. (2022). Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022. *Badan Nasional Penanggulangan Bencana*.
- Ningrum, A. S., & Ginting, K. B. (2020). Strategi Penanganan Banjir Berbasis Mitigasi Bencana Pada Kawasan Rawan Bencana Banjir di Daerah Aliran Sungai Seulalah Kota Langsa. *Geography Science Education Journal (GEOSEE)*, 1(1), 6–13.  
<https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/geosee/article/view/1919>
- Noer, K. U., & Putra, S. (2022). Collaborative Governance in Natural Disaster Mitigation in Bekasi Regency, Indonesia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 102.  
<https://doi.org/10.20961/sp.v17i2.64094>
- Pasaribu, L. P., Apsari, N. C., & Sulastri, S. (2023). Kolaborasi Penta Helix Dalam Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi. *Share : Social Work Journal*, 13(1), 140.  
<https://doi.org/10.24198/share.v13i1.47909>
- RPKB BPBD Kab. Banyuwangi. (2023). *RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA ( R P K B ) KABUPATEN BANYUWANGI Tahun 2023*. 71.
- Setya Yunas, N. (2019). Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur. *Matra Pembaruan*, 3(1), 37–46. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sunarya, D., & Sutoyo, E. (2023). Strategi Penanganan Banjir Di Kampung Babakan Bandung Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng. *SINKRON: Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya*, 1(1), 40. <https://doi.org/10.32832/jpmuj.v1i1.1672>
- Urbanus, A., Sela, R. L. E., & Tungka, A. E. (2021). Mitigasi Bencana Banjir Struktural dan Non Struktural Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Spasial*, 8(3), 447–458. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/36350>

Yulianto, A., & Mutiarin, D. (2018). Pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Desa Tangguh Bencana (DESTANA) (Studi Kasus Di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul). *APPPTMA*, 8.  
<https://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/29135/C.56.pdf?sequence=1>

